jogja istimewa

PEMERINTAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

b d n P_a ub ed E r h

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 31938108, Fax. (021) 3907508

Pos-el: banhubda@jogjaprov.go.id, Laman: www.banhubda.jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 900.1.1.2/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu Tim Penyusun Rencana Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
2. Mengkoordinasikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dengan semua pihak terkait;
3. Melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : April 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANHUBDA

NUGROHONINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 900.1.1.2/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA

No.	Nama	NIP	JABATAN
1	Nugrohoningsih, S.I.P	19701213 199703 2 005	KETUA
2	Linda Sudeni, S.H.	19771204 200502 2 002	SEKRETARIS
3	Rezqi Cindra Kasih, S.STP., M.Acc.Dev.	19920420 201406 2 002	ANGGOTA
4	Fifi Nia Ratnasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog	19860531 201101 2 012	ANGGOTA
5	Nur Wulan Hidayati, S.I.Kom	19821013 200902 2 010	ANGGOTA
6	Fitri Arum Sari, A.Md.Ak.	19981119 202102 2 001	ANGGOTA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NUGROHONINGSIH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridhoNya, telah dapat diselesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 yang kemudian disebut sebagai Perubahan RENJA Banhubda DIY Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun sebagai tindak lanjut atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka pelayanan Banhubda DIY dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 ini berisi tentang tujuan, sasaran strategis, isu-isu strategis, gambaran program dan kegiatan yang sistematis dalam rangka mendukung program-program Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Jakarta, Juni 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nugrohoningsih, S.I.P.
NIP 19701213 199703 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Landasan Hukum 1-2

1.3 Maksud dan Tujuan 1-3

1.4 Sistematika Penulisan 1-3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **2-1**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung daerah DIY Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-121

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-13

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **3-1**

BAB 4 PENUTUP **4-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun Berjalan (Tahun 2024) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-33

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan PenghubungDaerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-12

Tabel 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 3-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penghubung daerah DIY 2-14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, rencana pembangunan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Yang mana Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Banhubda DIY) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi tolok ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya perencanaan pembangunan tahunan pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya sebagai amanat peraturan perundangan yang ada, SKPD berkewajiban menyusun Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah selama satu tahun yang akan datang. Adapun RENJA Banhubda DIY Tahun 2025 disusun sebagai jabaran usulan rencana kegiatan dan anggaran setiap seksi pada Banhubda DIY pada tahun anggaran 2025 yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Subbidang Anjungan, Subbidang Promosi dan Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan.

Perubahan Renja Banhubda DIY Tahun 2025 disusun dengan pertimbangan tema perencanaan pembangunan tahun 2025 yakni “Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Banhubda DIY melaksanakan salah satu dari 6 prioritas pembangunan daerah Daerah Istimewa DIY pada tahun 2025 yaitu penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan.

Renja Banhubda DIY Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah DIY Nomor 900.1.1.2/62 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah DIY dan telah menjadi pedoman didalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banhubda DIY tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2023.

Seiring dengan perjalanan dinamika yang terjadi sampai dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2025, Banhubda DIY memandang perlu untuk melakukan Perubahan Renja Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Banhubda DIY Tahun 2025 menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:B/00.7.2.4/2185/B1 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Usulan Perubahan RKPD DIY Tahun 2025 akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Banhubda DIY Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY tahun anggran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 nomor 2);
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027; dan
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen awal Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025;
2. Memberikan Gambaran atas perubahan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2025:
3. Tersedianya rancangan rumusan strategi program dan kebijakan dalam skala prioritas yang lebih terarah;
4. Tersedianya rancangan acuan dalam menyusun perubahan program/kegiatan dalam tahun anggaran 2025;
5. Tersedianya rancangan tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah DIY dalam pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2025;
6. Rancangan arah semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip *clean and good governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja SKPD disajikan dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini menjelaskan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Banhubda DIY Tahun 2025 menjadi dasar disusunnya perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku. Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Banhubda DIY Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah DIY sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2025)

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun berkenaan dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun anggaran 2024 Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 11.885.210.031,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp 11.852.210.031,00 dan Belanja Modal Rp 33.000.000,00. Melalui mekanisme perubahan RKPD 2024 menjadi Rp 11.926.245.013,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp 11.849.545.013,00 dan Belanja Modal Rp81.700.000,00.

Pada tahun 2025, Banhubda DIY memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan. Pada Perubahan RENJA Badan Penghubung Daerah DIY ini jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan di atas mengalami perubahan berupa penambahan 1 (satu) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sehingga pada perubahan RENJA Banhubda DIY Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan.

Target-target perencanaan Banhubda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai. Indikator kinerja Sasaran Badan Penghubung Daerah DIY pada TW 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung dari target 88 angka indeks pada TW II tercapai 92,95. Pada target fisik, untuk Triwulan II capaian telah menyentuh angka 55,59% sedangkan pada target keuangan tercapai 43,23% atau dari target Rp11.688.440.502,- terealisasi belanja Rp5.050.230.552,-. Pada tabel 2.1 disajikan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD s/d Triwulan II tahun 2025.

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun Berjalan (Tahun 2025) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Daerah DIY

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2				**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			**5,900,000,000**		**4.108.079.863,00**		**4.170.013.000,00**		**870,773,278**		**20,88**		**870,773,278**		**14.76**
	2	**22**			**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**			**5,900,000,000**		**4.108.079.863,00**		**4.170.013.000,00**		**870,773,278**		**20,88**		**870,773,278**		**14.76**
1	**2**	**22**	**08**		**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah**	**100 %**	**5,900,000,000**	**100 %**	**4.108.079.863,00**	**100 %**	**4.170.013.000,00**	**100%**	**870,773,278**	**100 %**	**20,88**	**100 %**	**870,773,278**	**100**	**14.76**
	2	22	08	5.06	Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	n/a	-	2 jenis	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 %	250,000,000	100 %	239.228.250,00	100 %	233,200,000	100%	225,159,435	100	96,55	100 %	225,159,435	100	90,06
	2	22	08	5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	3 unit	250,000,000	4 unit	239.228.250,00	3 unit	233,200,000	3 unit	225,159,435	100	96,55	3 unit	225,159,435	100	90,06
	2	22	08	5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	100 %	1,250,000,000	100 %	794.644.700,00	100 %	950,000,000	100%	143,148,150	100	15,07	100 %	143,148,150	100	11,45
	2	22	08	5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	73 unit	1,250,000,000	1 unit	794.644.700,00	1 unit	950,000,000	1 unit	143,148,150	100	15,07	1 unit	143,148,150	100	11,45

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	22	08	5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah hasil fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	-	3 Laporan	3.074.206.913,00	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a
						Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 %	4,400,000,000	n/a	-	100 %	2.986.813.000,00	100%	968,703,383	100	32,43	100 %	968,703,383	100	22,02
	2	22	08	5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	3 laporan	4,400,000,000	33 laporan	3.074.206.913,00	3 laporan	2.986.813.000,00	3 laporan	968,703,383	100	32,43	3 laporan	968,703,383	100	22,02
	5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**11,581,000,000**		**7.187.242.872,00**		**8.242.779.702,00**		**3,713,219,584**		**45,05**		**3,713,219,584**		**32,06**
	5	**07**			**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**			**11,581,000,000**		**7.187.242.872,00**		**8.242.779.702,00**		**3,713,219,584**		**45,05**		**3,713,219,584**		**32,06**
2	**5**	**07**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91**	**10,936,000,000**	**92.3**	**7.013.360.044,00**	**90.8**	**8.057.471.102,00**		**3,645,722,270**	**90,8**	**45,25**	**81,21**	**3,645,722,270**	**81,21**	**33,34**
	5	07	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	65,000,000	100 %	6.773.000,00	100 %	12.150.000,00	100%	3.734.041	100	30,73	100 %	3.734.041	100	5,74
	5	07	1	1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	45,000,000	5 Dokumen	1.883.000,00	3 Dokumen	7.250.000,00	2 Dokumen	650.541	100	8,97	2 Dokumen	650.541	40	1,45
	5	07	1	1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	4,250,000	4 dokumen	1.150.000,00	2 dokumen	1.120.000,00	2 dokumen	1.114.200	100	99,48	2 dokumen	1.114.200	100	26,22

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
						Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	07	1	1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	4,250,000	n/a	1.475.000,00	2 dokumen	1.470.000,00	0 dokumen	-	0	-	0 dokumen	-	0	0.00
	5	07	1	1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11,500,000	3 Laporan	2.265.000,00	1 Laporan	2.310.000,00	1 Laporan	1.969.300	100	85,25	1 Laporan	1.969.300	33.3	17,12
	5	07	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	7,117,000,000	100 %	5.516.457.018,00	100 %	6.068.261.826,00	100%	2.871.261.418	100	47,32	100 %	2.871.261.418,	100	40,34
	5	07	1	1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org/bln	7,000,000,000	40 org/bln	5.474.692.518,00	50 org/bln	6.054.320.826,00	50 org/bln	2.864.398.918	100	47,31	50 org/bln	2.864.398.918	83.3	40,92
	5	07	1	1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	80,000,000	12 Dokumen	39.730.000,00	12 Dokumen	10.596.000,00	6 Dokumen	5.280.000	50	49,83	6 Dokumen	5.280.000	50	6,60
	5	07	1	1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	738.500,00	1 Laporan	705.000,00	1 Laporan	482.500	100	68,44	1 Laporan	482,500	100	24,13

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
						Keuangan Akhir Tahun SKPD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	07	1	1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	35,000,000	12 laporan	1.296.000,00	12 laporan	2.640.000,00	6 laporan	1,100,000	50	41,67	6 laporan	1,100,000	50	3,14
	5	07	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	25,000,000	100 %	6.756.000,00	100 %	13.236.000,00	100%	6.611.600	100	49,95	100 %	6.611.600	100	26,45
	5	07	1	1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	6.756.000,00	12 Laporan	13.236.000,00	6 Laporan	6.611.600	50	49,95	6 Laporan	6.611.600	50	26,45
	5	07	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	664,000,000	100 %	126.813.846,00	100 %	127.957.600,00	100%	40.727.400	100	31,83	100 %	40.727.400	100	6,13

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	07	1	1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	1 Paket	11.011.579,00	1 Paket	11.190.800,00	1 Paket	11.170.700	100	99,82	1 Paket	11.170.700	100	31,92
	5	07	1	1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85,000,000	1 Paket	33.801.732,00	3 Paket	27.615.000,00	3 Paket	10.444.000	100	37,82	3 Paket	10.444.000	300	12,29
	5	07	1	1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	1 Paket	13.025.907,00	1 Paket	14.161.800,00	1 Paket	9.789.800,	100	69,13	1 Paket	9.789.800,	100	27.97
	5	07	1	1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	2.205.100,00	2 Dokumen	2.343.000,00	1 Dokumen	1.500.000	50	64,02	1 Dokumen	1.500.000	50	16,67
	5	07	1	1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	500,000,000	2 Laporan	66.769.528,00	2 Laporan	72.192.000,00	2 Laporan	7.822.900	100	10,84	2 Laporan	7.822.900	100	1,56
	5	07	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	50,000,000	100 %	48.575.000,00	100 %	40.840.000,00	100%	8,400,000	100	20,57	n/a	8,400,000	100	16,80
	5	07	1	1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	07	1	1.07.0002	Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a
	5	07	1	1.07.0005	Pengadaan Mebel (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	1 unit	50,000,000	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	0	0.00
	5	07	1	1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100 %	48.575.000,00	100 %	40.840.000,00	100	8,400,000	100	20,57	100	8,400,000	100	16,80
	5	07	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	1,540,000,000	100 %	981,644,849	100 %	1.438.565.676,00	100%	537.382.599	100	37,36	100 %	537.382.599	100	34,89
	5	07	1	1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	9.293.906,00	12 Laporan	11.600.000,00	6 laporan	3.224.800	50	27,80	6 laporan	3.224.800	50	8,06
	5	07	1	1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	550,000,000	3 Laporan	228.942.867,00	12 Laporan	308.531.500,00	6 laporan	125.926.912	50	40,81	6 laporan	125.926.912	200	22,90
	5	07	1	1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	950,000,000	2 laporan	801.327.921,00	12 laporan	1.118.434.176,00	6 laporan	408.230.887	50	36,50	6 laporan	408.230.887	300	42,97
	5	07	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	100 %	1,475,000,000	100 %	268.420.486,00	100 %	356.460.000,00	100%	177.605.212	100	49,82	100 %	177.605.212	100	12,04

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	5	07	1	1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	225,000,000	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	0	0.00
	5	07	1	1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	600,000,000	11 unit	264.420.486,00	12 unit	350.860.000,00	11 unit	175.605.212	100	50,05	11 unit	175.605.212	100	29,27

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	07	1	1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	600,000,000	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	0	0.00
	5	07	1	1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	50,000,000	20 unit	4.000.000,00	28 unit	5.600.000,00	10 unit	2,000,000	50	35,71	10 unit	2,000,000	100	4
3	**5**	**07**	**2**		**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase Layanan yang diberikan Banhubda DIY**	**100 %**	**645,000,000**	**100 %**	**173.882.828,00**	**100 %**	**185,308,600**	**100%**	**67.497.314**	**100**	**36,42**	**100 %**	**67.497.314**	**100**	**10,46**
	5	07	2	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	n/a	-	7 Laporan	173.882.828,00	n/a	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a
						Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100 %	645,000,000	100 %	173.882.828,00	100 %	185,308,600	100%	67.497.314	100	36,42	100 %	67.497.314	100	10,46
	5	07	2	1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 Laporan	325,000,000	5 Laporan	96.854.828,00	5 Laporan	113,985,600	5 Laporan	52.405.314	100	45,98	5 Laporan	52.405.314	100	16,12
	5	07	2	1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH)	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan	2 Laporan	320,000,000	2 Laporan	77.028.000,00	2 Laporan	71,323,000	2 Laporan	15.092.000	100	21,16	2 Laporan	15.092.000	100	4,72

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027)		Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025*)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10		11 = 10/5 x 100%	
			Pelestarian Seni Budaya	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

Ket:
*) Kolom 7: Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 diperoleh dari DPA Banhubda DIY TA 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Merujuk pada hal diatas maka Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah DIY RPJMD 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	-	-	n/a	87 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	n/a	89 angka indeks	92,95 angka indeks	88,5 angka indeks	Capaian 2025 diperoleh sampai akhir Juni 2025
2	Meningkatnya tata kelola penyelengaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	-	-	A (85,55)	A (86,55)	A (87,55)	A (88,55)	A	A	A (88,43)	A (89,55)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan penghubung termasuk didalamnya penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan penghubung. Akses informasi yang belum maksimal terkait fasilitas pelayanan yang diberikan Banhubda, akan menjadi lebih optimal saat ada penunjang dari sisi teknologi, sehingga memudahkan pemantauan fasilitas pelayanan yang tersedia, kondisi terkini, hingga memfasilitasi feed back kepuasan layanan secara digital. Kondisi tersebut bisa terwujud jika didukung juga oleh SDM yang memadai dan aset/sarana yang baik dan menunjang.

2. Peningkatan kualitas promosi yang dapat lebih memfasilitasi dan menjembatani potensi seni budaya dan industri kreatif yang ada di DIY. Akan tetapi kondisi ini perlu adanya dukungan atau peningkatan SDM dan sarana penunjang, sehingga kualitas promosi yang diberikan menjadi lebih optimal.

3. Peningkatan pelestarian seni budaya Yogyakarta di Jakarta menuju Banhubda sebagai pusat seni dan budaya gaya Yogyakarta di Ibu kota Negara.

4. Posisi strategis yang berada di Ibu Kota, dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY masih memiliki peluang besar yang masih bisa dikembangkan yaitu meluaskan fasilitasi dan koordinasi dengan diaspora se-Indonesia.

5. Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 0leh karena itu diperlukan persiapan menyikapi adanya 2 (dua) aturan tersebut.

Banhubda DIY menaungi keberadaan Anjungan DIY di TMII. Sebagai anjungan daerah di TMII, saat ini kegiatan pentas-pentas kesenian telah kerap dilakukan. Pentas-pentas dilakukan

baik secara mandiri oleh Banhubda DIY maupun bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY,Kabupaten / Kota di Yogyakarta, dan stakeholder terkait. Sebagai satu-satunya OPD DIY yang berlokasi di ibukota, kegiatan kesenian yang dilaksanakan oleh Banhubda DIY dapat menjadi oase bagi masyarakat pencinta seni langgam Yogyakarta di Jakarta dan sekitarnya. Pentas kesenian ini juga sebagai media pelestarian budaya agar generasi muda di Jakarta dan sekitarnya tetap dapat mengetahui dan menjaga budaya daerah khususnya Yogyakarta. Semua peran tersebut membuat Banhubda DIY dapat menjadi lembaga yang vital bagi Pemerintah DIY.

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Penghubung Daerah DIY meliputi:

1. Subbag Tata Usaha;
2. Subbid Anjungan;
3. Subbid Promosi;
4. Subbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY

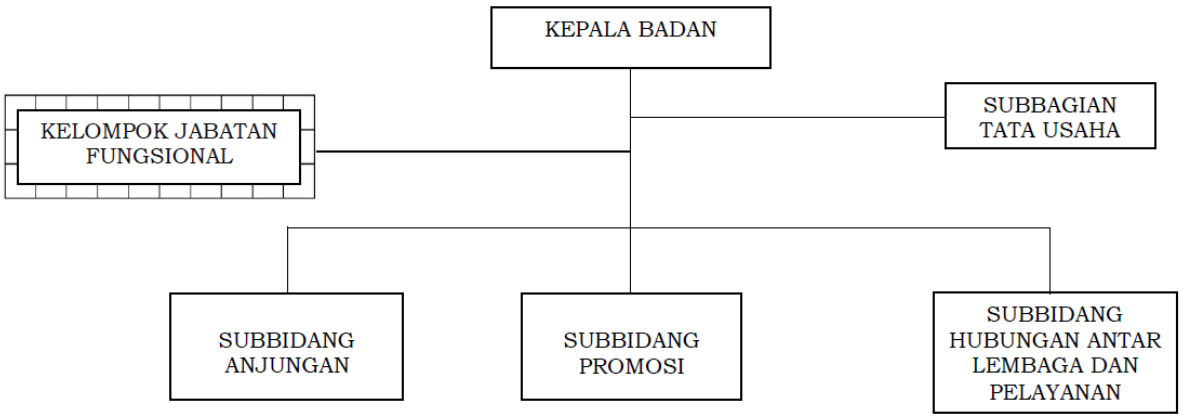

Sumber data: Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2024

Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan pelayanan publik di Griya Jogja, Wisma Jogja, dan Anjungan DIY di TMII. Saat ini beberapa *AC* di Wisma Jogja sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Demikian juga beberapa *AC* dan mesin pompa di Anjungan DIY di TMII. Kondisi ini tentu menghambat terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Griya Jogja mulai tahun 2024 menyewakan sebagian ruangannya menjadi Restoran. Hal ini membuat keramaian di Griya Jogja bertambah. Tata letak penginapan, restoran, dan ruang kantor juga terkoneksi. Saat ini setiap shift petugas kemanan hanya diisi oleh 2 (dua) orang. Hal-

hal tersebut menuntut system keamanan yang lebih baik sehingga diperlukan CCTV yang diharapkan dapat memperkuat system keamanan di Griya Jogja.

Beberapa sumber daya pendukung juga masih diperlukan oleh Banhubda seperti penambahan anggaran tol sebagai konsekuensi naiknya tarif beberapa ruas jalan tol. Anggaran tol dimanfaatkan sebagai pendukung pelayanan yang diberikan Banhubda kepada aparatur pemerintah DIY yang sedang bertugas di Jakarta. Juga pembelian stiker untuk melengkapi administrasi aset dan beberapa keperluan pendukung lainnya.

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah tidak dapat terpisah dari dokumen Rencana Strategis yang dimiliki. Dokumen ini menjadi acuan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Sesuai Rencana strategis Badan Penghubung Daerah Tahun 2022-2027, untuk tahun 2025 rencana kerja dan pendanaan Badan Penghubung Daerah DIY yaitu sebagai berikut :

Tabel 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH							**13.309.490.195,00**	**12.412.792.702,00**	**11.644.852.414,00**	**-1.664.637.781,00**							**16.646.892.799,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.653.713.800,00**	**4.170.013.000,00**	**3.562.035.000,00**	**-2.091.678.800,00**							**5.773.392.799,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**5.653.713.800,00**	**4.170.013.000,00**	**3.562.035.000,00**	**-2.091.678.800,00**							**5.773.392.799,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.653.713.800,00**	**4.170.013.000,00**	**3.562.035.000,00**	**119.678.999,00**							**5.773.392.799,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*				100 %	100 %	311.200.000,00	233.200.000,00	233.200.000,00	-78.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				3.00 Unit	12.00 Unit	311.200.000,00	233.200.000,00	233.200.000,00	-78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif*				100 %	100 %	1.318.385.000,00	950.000.000,00	846.236.000,00	-472.149.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UMKM DIY dan Masyarakat		1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				40.00 Unit	2 Unit	1.318.385.000,00	950.000.000,00	846.236.000,00	-472.149.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksanany a dukungan penyelenggar an Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*				100 %	100 %	4.024.128.800,00	2.986.813.000,00	2.482.599.000,00	-1.541.529.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	asyarakat		3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah																		
			Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah				3.00 Laporan	3 Laporan	4.024.128.800,00	2.986.813.000,00	2.482.599.000,00	-1.541.529.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.655.776.395,00**	**8.242.779.702,00**	**8.082.817.414,00**	**427.041.019,00**							**11.489.250.002,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**7.655.776.395,00**	**8.242.779.702,00**	**8.082.817.414,00**	**427.041.019,00**							**11.489.250.002,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**90,7 Angka**	**90,7 Angka**	**7.470.467.795,00**	**8.242.779.702,00**	**8.082.817.414,00**	**427.041.019,00**							**10.929.250.002,00**	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanany a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan*				100 %	100 %	12.150.000,00	12.150.000,00	6.054.000,00	-6.096.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		48.250.002,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	3 Dokumen	7.250,000	7.250,000	1.484.000,00	-5.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,120,000	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,470,000	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1 Laporan	2.310.000,00	2.310.000,00	1.980.000,00	-330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*				100 %	100 %	5.480.594.519,00	6.068.261.826,00	5.965.699.738,00	485.105.219,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		6.994.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40.00 Orang/ Bulan	40 Orang / Bulan	5.466.653.519,00	6.054.320.826,00	5.951.782.738,00	485.105.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.897.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.596.000,00	10.596.000,00	10.572.000,00	-24.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				100 %	100 %	13.236.000,00	13.236.000,00	13.212.000,00	-24.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	13.236.000,00	13.236.000,00	13.212.000,00	-24.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 %	100 %	128.621.600,00	127.957.600,00	72.334.600,00	-566.287.000			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		537.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.190.800,00	11.190.800,00	13.270.800,00	2.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pada berbagai tingkatan				
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	3 Paket	27.615.000,00	27.615.000,00	13.540.000,00	-14.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	14.616.800,00	14.616.800,00	15.530.800,00	-914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	2,343,000	2,343,000	2,343,000	0,,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	72.856.000,00	72.192.000,00	27.650.000,00	-45.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler*				100 %	0 %	40.840.000,00	40.840.000,00	12.000.000,00	-28.840.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	0 Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	0 Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Paket	0 Paket	n/a	0,00	0,00	-0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	40.840.000,00	40.840.000,00	12.000.000,00	-28.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*				100 %	100 %	1.438.565.676,00	1.438.565.676,00	1.438.565.676,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		1.330.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	12 Laporan	308.531.500,00	308.531.500,00	308.531.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	12 Laporan	1.118.434.176,00	1.118.434.176,00	1.118.434.176,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan*				100 %	100 %	356.460.000,00	356.460.000,00	392.894.000,00	36.434.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	5.06.01.1 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	0 Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12.00 Unit	11 Unit	350.860.000,00	350.860.000,00	337.894.000,00	-12.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	20 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5.000.000,00	-600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY**				**100 %**	**100 %**	**185.308.600,00**	**185.308.600,00**	**182.057.400,00**	**414.691.400,00**							**560.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya*				100 %	100 %	185.308.600,00	185.308.600,00	182.057.400,00	-3.251.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan		560.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																	Masyarakat			
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	113.985.600,00	113.985.600,00	110.734.400,00	-3.251.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2.00 Laporan	2.00 Laporan	71.323.000,00	71.323.000,00	71.323.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

BAB 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025 ini merupakan panduan rencana kerja Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY di Tahun 2025. Langkah-langkah konkrit dan terukur guna implementasi di lapangan, serta untuk mewujudkan rancangan kinerja program – kegiatan yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan dan sasaran akan terus dilakukan demi tercapainya visi – misi yang telah ditentukan.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, disamping ditentukan oleh akurasi perencanaan, tergantung pula pada peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait yang ada di Pemerintah DIY pada umumnya serta kinerja subbidang di internal Banhubda DIY khususnya. Diharapkan adanya masukan serta saran terhadap penyempurnaan Renja Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2025 ini, sehingga perencanaan ke depan dapat lebih mengarahkan Banhubda DIY pada pencapaian tujuan keberadaannya.

Jakarta, Juni 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BANHUBDA

Nugrohoningsih, S.I.P
NIP 19701213 199703 2 005

BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

Jl. Pangeran Diponegoro No. 52, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telp: (021) 31938108
Website: https://banhubda.jogjaprov.go.id/
Email: banhubda@jogjaprov.go.id

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Renja Perubahan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.		√	Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025.	Tidak ada.
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025.	Tidak ada.
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.		√	Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2025.	Tidak ada.
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

YOGYAKARTA, JUNI 2025
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NUGROHONINGSIH, S.I P
NIP 19701213 199703 2 005